

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
USULAN RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen : Memperkuat Partisipasi Politik Kewargaan Melalui RUU Perkumpulan
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab : Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian/Lembaga Terkait : Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Dalam Negeri; Komnas HAM
Bappenas : Direktorat Politik dan Komunikasi; Direktorat Hukum dan Regulasi
CSO Mitra : Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA),
 Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Point of Contact :
Kementerian/Lembaga :

Sasaran Keberhasilan <i>(Dapat diisi sesuai dengan "Output yang diharapkan" yang terdapat dalam Milestone OGP)</i>	Penanggung Jawab <i>(Diisi dengan K/L atau OMS terkait)</i>	Ukuran Keberhasilan <i>(Merupakan tujuan akhir yang perlu dilakukan dalam mencapai output/Sasaran Keberhasilan)</i>	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
--	---	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

Memperkuat Partisipasi Politik Kewargaan Melalui RUU Perkumpulan	Kementerian Hukum dan HAM	Adanya serangkaian FGD atau workshop guna melibatkan masyarakat sipil secara bermakna dalam proses penyusunan draf RUU Perkumpulan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya FGD atau workshop pertama penyusunan draf RUU Perkumpulan • Terdokumentasinya masukan dari masyarakat sipil atas perbaikan draf RUU Perkumpulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya FGD atau workshop kedua penyusunan draf RUU Perkumpulan • Terdokumentasinya masukan dari masyarakat sipil atas perbaikan draf RUU Perkumpulan 	-	-	
		Adanya serangkaian konsultasi publik di 5 wilayah yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil lokal, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat lokal dalam memberikan masukan terhadap draf NA dan RUU Perkumpulan	-	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya dua konsultasi publik NA dan RUU Perkumpulan di 2 wilayah • Terdokumentasinya masukan dari berbagai pemangku kepentingan atas perbaikan draf NA dan RUU Perkumpulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya dua konsultasi publik NA dan RUU Perkumpulan di 2 wilayah • Terdokumentasinya masukan dari berbagai pemangku kepentingan atas perbaikan draf NA dan RUU 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya 1 konsultasi publik NA dan RUU Perkumpulan di 1 wilayah • Terdokumentasinya masukan dari berbagai pemangku kepentingan atas perbaikan draf NA dan RUU 	

	Adanya komitmen dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengusulkan RUU Perkumpulan untuk dibahas oleh DPR RI		Masuknya RUU Perkumpulan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2024 dari usulan Pemerintah		Masuknya RUU Perkumpulan dalam Prolegnas 2025 - 2029 dari usulan Pemerintah	
YAPPIKA, MediaLink, PSHK	Adanya serangkaian FGD atau workshop guna melibatkan masyarakat sipil secara bermakna dalam proses penyusunan draf RUU Perkumpulan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan OMS dalam FGD atau workshop pertama penyusunan draf RUU • Adanya masukan tertulis dari OMS mengenai draf RUU Perkumpulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan OMS dalam FGD atau workshop pertama penyusunan draf RUU • Adanya masukan tertulis dari OMS mengenai draf RUU Perkumpulan 	-	-	
	Adanya serangkaian konsultasi publik di 5 wilayah yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil lokal, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat lokal dalam memberikan masukan terhadap draf NA dan RUU Perkumpulan		<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan OMS dalam dua konsultasi publik NA dan RUU Perkumpulan di 2 wilayah • Adanya masukan tertulis dari OMS mengenai draf NA dan RUU Perkumpulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya dua konsultasi publik NA dan RUU Perkumpulan di 2 wilayah • Adanya masukan tertulis dari OMS mengenai draf NA dan RUU Perkumpulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan OMS dalam satu konsultasi publik NA dan RUU Perkumpulan di 2 wilayah • Adanya masukan tertulis dari OMS mengenai draf NA dan RUU Perkumpulan 	

		Adanya komitmen dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengusulkan RUU Perkumpulan untuk dibahas oleh DPR RI		Keterlibatan OMS dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2024 di Kementerian Hukum dan HAM		Keterlibatan OMS dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas 2025 - 2029 di Kementerian Hukum dan HAM	
--	--	--	--	--	--	---	--